

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bencana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 merujuk pada kejadian atau serangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat. Bencana tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau interaksi faktor manusia, yang berakibat pada kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Indonesia, sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam tertinggi, sering kali mengalami bencana hidrometeorologi seperti letusan gunung, puting beliung, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi dan Tsunami. Faktor-faktor iklim dan cuaca ekstrem berkontribusi pada terjadinya bencana-bencana ini di Indonesia.(Haniya et al., 2021)

Bencana yang sering terjadi, terutama di daerah pesisir atau pantai, adalah bencana tsunami. Kejadian ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aktivitas gempa bumi di dasar laut, kondisi geografis, serta faktor cuaca dan iklim yang ekstrem. Musim-musim tertentu, seperti musim hujan, juga dapat berkontribusi terhadap risiko bencana tsunami. Pemahaman tentang pola cuaca, geologi wilayah pesisir, dan pengelolaan pesisir yang kurang optimal dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana ini. Penting untuk mencatat bahwa pendirian bangunan dan infrastruktur di daerah pesisir juga menjadi faktor krusial

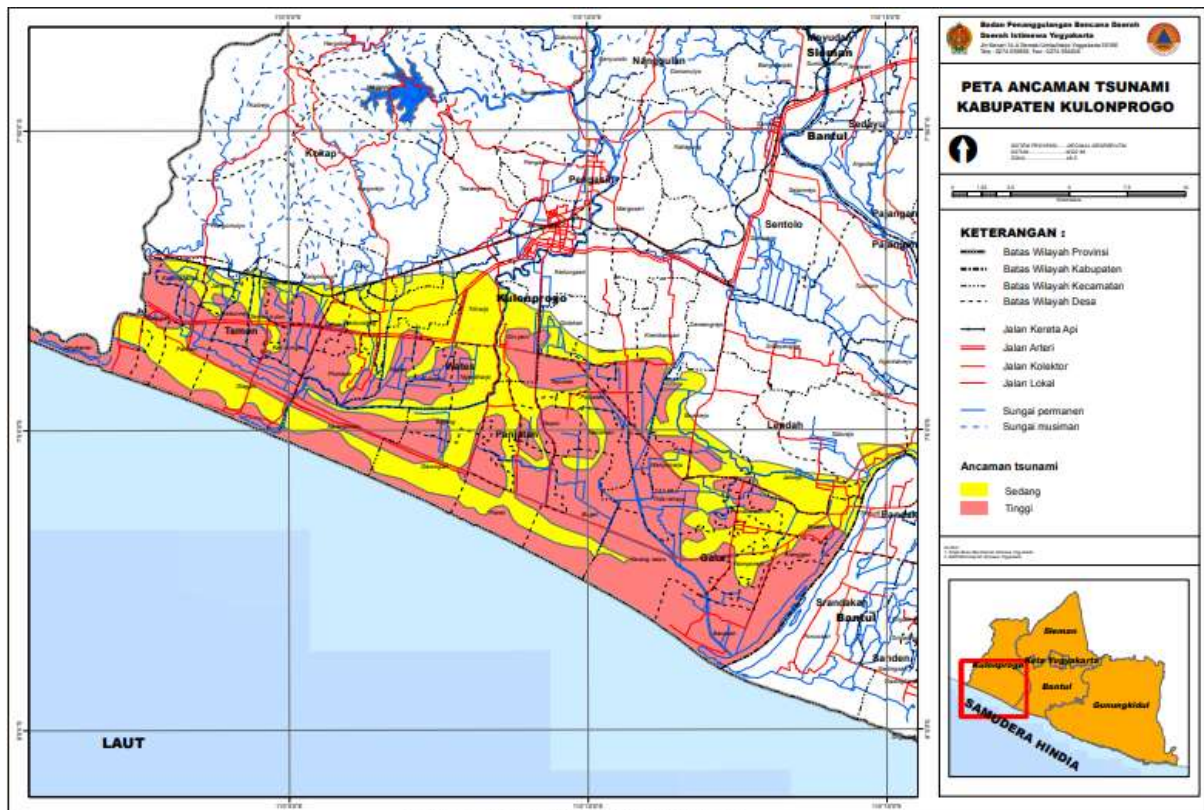
jika tidak disesuaikan dengan potensi ancaman tsunami, dapat meningkatkan tingkat kerentanan dan dampak bencana. Oleh karena itu, pemahaman dan mitigasi terhadap bencana tsunami perlu ditingkatkan untuk melindungi komunitas di wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan tindakan mitigasi yang sesuai dengan konsep yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (BNPB, 2007). Mitigasi diartikan sebagai rangkaian langkah untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur fisik maupun upaya kesadaran dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa penetapan strategi mitigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan dijalankan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan kondisi dan kewenangan di daerah masing-masing.

Perlunya melaksanakan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana alam menjadi aspek yang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan bencana. Penanganan bencana alam memerlukan pendekatan yang terencana, dengan manajemen yang efektif dan melalui proses yang matang, jauh dari pendekatan yang bersifat insidental. Upaya mitigasi mencakup sejumlah langkah, termasuk penetapan kebijakan dalam pembangunan di wilayah rawan bencana, yang bertujuan untuk pencegahan bencana, terutama tsunami. Kesadaran akan urgensi mitigasi dan penerapan kebijakan yang terencana menjadi langkah kunci dalam menjaga Masyarakat dari potensi dampak bencana alam.

Banyaknya daerah di Indonesia yang rawan bencana alam membutuhkan perhatian dan kewaspadaan dini untuk mengantisipasinya. Karena itulah kebijakan

mitigasi bencana harus dilakukan dan disosialisasikan kepada Masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi tsunami adalah Kabupaten Kulon Progo DIY. Letak Geografis provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta terletak berada tepat Selatan pulau Jawa dan berada tepat dipesisir Pantai Selatan pulau Jawa yang menyebabkan potensi besar terjadinya tsunami.

Gambar 1.1 Peta Ancaman Tsunami Kabupaten Kulon Progo



Gambar 4.2. Peta Ancaman Tsunami Kabupaten Kulonprogo

IV-4

Sumber: PEMDA DIY

Kulon Progo memiliki klasifikasi zona berdasarkan tingkat risiko tsunami, yaitu zona merah yang memiliki risiko tinggi, zona kuning yang memiliki risiko lebih rendah, dan zona putih yang dianggap aman dari tsunami.

Salah satu daerah yang berpotensi terkena dampak bencana tsunami. Kawasan ini memiliki garis pantai yang berdekatan dengan samudera hindia, dan geografisnya memperlihatkan kerentanan tinggi terhadap bencana tsunami, mengingat terletak di zona subduksi indo-australia dan eurasia, yang sering menjadi sumber gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan mitigasi bencana tsunami yang kuat di kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi risiko dan dampak bencana tersebut.

Berdasarkan data historis, catatan tentang peristiwa tsunami di Pulau Jawa dalam kurun waktu 400 tahun terakhir mencerminkan ancaman yang signifikan bagi wilayah pesisir ini. Pulau Jawa, dengan garis pantai yang panjang dan padat penduduk, telah menjadi sasaran sejumlah peristiwa tsunami yang mematikan. Salah satu kejadian yang paling berkesan adalah tsunami yang melanda pantai selatan Jawa Barat, Cilacap, dan Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2006. Kejadian ini terjadi akibat gempa bumi bawah laut yang kuat dan memicu gelombang tsunami yang meluluhlantakkan sebagian wilayah pesisir. Tsunami ini menyebabkan kerusakan fisik yang parah, hilangnya banyak nyawa, dan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam konteks penelitian ini, akan diuraikan secara mendalam bagaimana peristiwa-peristiwa seperti ini telah membentuk pemahaman akan potensi bahaya tsunami di Pulau Jawa dan bagaimana data historis ini menjadi landasan penting dalam upaya mitigasi dan persiapan bencana (Pribadi et al., 2006).

Penting untuk mencatat bahwa peristiwa-peristiwa ini telah memotivasi pemerintah dan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan

sistem peringatan dini, pelatihan dan edukasi masyarakat mengenai tindakan saat terjadi tsunami, dan pengembangan rencana darurat yang lebih baik untuk menghadapi bencana serupa di masa depan. Sejarah bencana tsunami di Kabupaten Kulon Progo menjadi pengingat penting akan risiko yang terkait dengan kerentanan geografisnya, dan menjadi landasan bagi upaya mitigasi yang lebih kuat untuk melindungi penduduk dan aset di wilayah ini dari ancaman bencana tsunami di masa mendatang.(Widyawati et al., 2013)

Mitigasi bencana merupakan upaya krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sebuah negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, termasuk gempa bumi dan tsunami. Dalam konteks ini, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) telah memainkan peran penting dalam upaya memitigasi risiko bencana. Melalui verifikasi ulang peta rawan bahaya tsunami dan peta evakuasi tsunami, seperti yang baru-baru ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, BMKG berkomitmen untuk menyusun data yang akurat berdasarkan pemodelan dan kondisi lapangan. Hal ini memungkinkan pengembangan strategi mitigasi yang tepat, termasuk penentuan jalur evakuasi yang aman. Upaya seperti ini adalah langkah proaktif dalam mempersiapkan masyarakat setempat dan mendukung visi 'zero victims' yang mengharapkan untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi nyawa serta harta benda masyarakat secara maksima.(BMKG, 2021)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memainkan peran penting dalam upaya ini, khususnya melalui Direktorat Kesiapsiagaan, yang telah menjalin kerja sama erat dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Salah satu langkah

konkrit yang mereka ambil adalah penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi. Tindakan ini merupakan contoh nyata dukungan BNPB kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi darurat bencana. Program IDRIP yang digagas oleh BNPB bertujuan untuk memperkuat rencana mitigasi dan respons bencana di seluruh negeri. Kerja sama antara lembaga pemerintah pusat dan daerah sangat penting, karena bencana seperti tsunami tidak mengenal batas administratif. Dalam hal ini, persiapan dan perencanaan yang matang dapat membantu menyelamatkan nyawa, melindungi harta benda, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menghancurkan. Terlebih lagi, pendekatan proaktif seperti ini merupakan bagian integral dari upaya lebih luas dalam membangun budaya keselamatan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman bencana. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terkait tsunami dan bencana alam lainnya juga harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat dapat merespons dengan cepat dan efektif saat ancaman bencana benar-benar terjadi. Dengan terus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih aman dan tahan bencana di masa depan. (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB/Tasril Mulyadi, 2023)

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari akun resmi BPBD Kulon Progo mengenai pelaksanaan mitigasi bencana yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) kabupaten Kulon Progo dalam menangani bencana tsunami yakni sebagai berikut: 1) mitigasi bencana secara non struktural yang sudah dilakukan oleh BPBD kabupaten Kulon Progo sudah dinilai

baik dalam pelaksanaannya ini dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan di desa atau program desa tangguh bencana, selain itu adanya simulasi kesiapsiagaan yang terletak di daerah rawan bencana, adanya pemasangan Early warning system di daerah rawan bencana, adanya pemasangan rambu jalur evakuasi, pelatihan relawan, penyusunan rencana kontinjensi tsunami dan penguatan PUSDALOPS BPBD Kabupaten, 2) Sumber daya yang ada dibadan penanggulangan bencana Kulon Progo masi dinilai kurang karena beberapa sumber daya manusia yang ada bukan termasuk lulusan yang sesuai dengan bidang kebencanaan tersebut, sarana prasana yang dimiliki BPBD Kulon Progo sudag tergolong lengkap.

Dari hasil awal penelitian yang dilakukan peneliti di akun resmi BPBD Kulon Progo, ini terlihat bahwasanya dalam pelaksanaan mitigasi bencana tsunami secara struktural belum terlihat pada kegiatan yang dilakukan BPBD kabupaten Kulon Progo, dalam hal mitigasi bencana secara struktural menjadi sangat penting untuk mencegah dampak yang merugikan akibat terjadinya tsunami. Tsunami memiliki potensi menghambat jalannya kegiatan ekonomi, terutama di daerah pesisir yang sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak bencana tsunami dapat mencakup kerusakan infrastruktur pesisir, pelabuhan, dan fasilitas ekonomi lainnya, menghancurkan tanaman perkebunan, serta mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Di samping itu, adanya Bandara Internasional Yogyakarta di DIY yang menjadi pusat aktivitas transportasi dan ekonomi, menambah kompleksitas dampak potensial yang dapat terjadi. Oleh karena itu, mitigasi bencana secara struktural, seperti pembangunan infrastruktur perlindungan pantai atau bangunan tahan gempa, menjadi esensial untuk melindungi keberlanjutan

kegiatan ekonomi dan keselamatan masyarakat di daerah pesisir serta sentra transportasi tersebut.

Maka menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam upaya mitigasi bencana tsunami , yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana tsunami Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewah Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan oleh sebab itu tujuan penelitian ini yakni untuk dapat meneliti terkait pelaksana kebijakan mitigasi bencana tsunami secara di Kulon Progo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk dapat memperluas wawasan dibidang keilmuan kebencanaan yang berfokus dalam mitigasi bencana tsunami.
 - b. Dapat menjadi bahan pendukung dalam penelitian-penelitian yang memiliki fokus yang sama
2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah dan Masyarakat

Manfaat bagi pemerintah dan juga Masyarakat dapat memberikan informasi terkait dengan sejauhmana pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana tsunami yang dilakukan oleh pihak pemerintah

b. Bagi penulis

Bagi penulis sendiri hasil dari penelitian ini akan memberikan pengalaman serta memperluas wawasan dan juga pendalaman teori yang sudah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Hasil temuan
1	(Jokowin arno, 2018)	Mitigasi Bencana Tsunami Di Wilayah Pesisir Lampung	Penelitian ini mencakup beberapa tahapan dalam upaya mitigasi bencana. Pertama, dilakukan perlindungan terhadap kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan di wilayah pesisir. Kedua, meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat pesisir dalam upaya mitigasi terhadap bencana gelombang pasang. Ketiga, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Keempat, meningkatkan koordinasi dan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam mitigasi bencana. Kelima, menyusun kerangka hukum yang efektif untuk mendukung upaya mitigasi, termasuk pengembangan regulasi terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur penahan bencana, serta penegakan hukum terkait mitigasi. Selanjutnya, kebijakan keenam adalah mempromosikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan mitigasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, keamanan, dan kenyamanan di kawasan pesisir untuk mendukung aktivitas perekonomian.

2	(Putera et al., 2020)	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Padang	Penelitian ini mengangkat isu penting tentang penataan ruang yang menjadi krusial bagi daerah yang rentan terhadap bencana. Kota Padang, sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap gempa bumi, harus memperhatikan pengaturan ruangnya dengan serius. Pasca gempa tahun 2009, Kota Padang telah dua kali merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2010 dan 2015. Dalam revisi RTRW tersebut, dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap bencana gempa dan tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang dalam penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang di Kota Padang, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, telah mempertimbangkan daerah-daerah yang rentan terhadap bencana, sebagaimana terlihat dari pengkategorian daerah rawan bencana di Kota Padang. Namun, masih ada daerah yang rentan terhadap bencana yang tidak mematuhi aturan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang perlu memperhatikan rekomendasi perizinan pembangunan bangunan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana, dari instansi-instansi terkait.
3	(Burhanudin Mukhammad Faturahman 1, 2019)	Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik	Penelitian ini membahas kebijakan mitigasi bencana di daerah rawan bencana dalam jangka menengah regional rencana pembangunan (RPJMD) di Kabupaten Pacitan Ponorogo dan Trenggalek. Hasil penelitian menunjukkan, mitigasi bencana secara konseptual sebagai output, kondisi empiris daerah rawan bencana sebagai input, proses eksekutif dan legislatif sebagai suatu proses dalam siklus kebijakan publik. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi agendanya kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Ponorogo dan Trenggalek melalui program Pembangunan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam.
4	(Edyanto, 2016)	Analisa Kebijakan Penataan Ruang	Pentingnya penanganan terhadap ancaman bahaya tsunami bagi masyarakat pedesaan di wilayah pesisir tidak dapat disangkal, dengan tujuan utama untuk mengurangi atau meminimalkan dampak

		Untuk Kawasan Rawan Tsunami Di Wilayah Pesisir	kerugian yang mungkin timbul akibat bencana alam tersebut. Namun, dalam beberapa proyek perencanaan tata ruang di Indonesia, sering kali efek dari tsunami tidak mendapat analisis dan pertimbangan yang memadai. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan data terkait lokasi tersebut. Wilayah pesisir memerlukan perlindungan yang efektif terhadap potensi tsunami, mengingat jumlah penduduk yang tinggal di sana dan aktivitas mereka. Inisiatif pembangunan hutan mangrove oleh pemerintah setempat dan peningkatan perencanaan spasial pesisir dapat menjadi langkah yang efektif dalam mengurangi risiko bahaya di sepanjang pantai.
5	(Fadila et al., 2022)	Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Kabupaten Mukomuko	penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi terhadap bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami di Kabupaten Mukomuko, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas mitigasi tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung meliputi anggaran yang memadai dari pemerintah dan keterlibatan aktif aparat dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana serta prasarana yang masih belum memadai.
6	(Aulia Setya Lestari1, Muzani1, 2023)	Mitigasi bencana tsunami Pantai pangandaran,jawa barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk mitigasi yang dilakukan secara struktural, seperti penanaman mangrove, pembuatan jalur evakuasi, pembangunan tempat evakuasi sementara dengan jarak sekitar 500 meter dari pantai, pembangunan benteng sebagai pemecah ombak, dan pemasangan sistem peringatan dini tsunami. Sementara itu, upaya mitigasi non-struktural mencakup penerapan kebijakan tata guna lahan, pengembangan sistem peringatan dini yang dipublikasikan melalui berbagai media, serta penyelenggaraan simulasi mitigasi bencana tsunami. Program-program inovatif dalam mitigasi bencana tsunami juga diterapkan, seperti program Anak TK Mitigasi, Wisata Edukasi Bencana Goes To School, Silaturahmi Empati Berbagi Edukasi Bencana, Bunda Belajar Mitigasi, Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, dan Hotel dan Restoran Tangguh Bencana.

7	(Eka Chandra Ramadhann & Chamid, 2022)	Analisis Kerentanan Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Kecamatan Labuan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menghitung indeks kerentanan terhadap tsunami. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai peran pemerintah dalam upaya mitigasi untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kecamatan Labuan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian juga menyoroti bahwa peran pemerintah setempat dalam mitigasi bencana tsunami di wilayah tersebut masih belum optimal.
8	(Wijanar ko et al., 2022)	Mitigasi Bencana Tsunami Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tsunami Disaster Mitigation In The Coastal Area Of East Bolaang Mongondow Regency	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan daerah rawan tsunami dan merencanakan strategi mitigasi bencana di wilayah pesisir Kabupaten Boltim. Tahapan penanganan bencana memperhitungkan tingkat keterpaparan dan potensi kerugian dari bencana tsunami, serta melakukan analisis risiko terhadap kemungkinan bencana tersebut. Evaluasi risiko bencana dilakukan dengan mempertimbangkan indeks bahaya dan kerentanan terhadap tsunami, mengacu pada Pedoman Umum Penilaian Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2012. Hasil dari evaluasi risiko ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi pengurangan risiko bencana tsunami, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural.
9	(PRAPTING SUKOWATI, 2011)	Implementasi Kebijakan Penanganan Bencana Tsunami Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana Di Provinsi Jawa Timur	Sering kali, peran pemerintah daerah tidak sesuai dengan aturan yang ada dan implementasi yang terjadi di lapangan. Hal ini menyebabkan konflik antara berbagai kepentingan, baik dari masyarakat, antar daerah, maupun antar pemangku kepentingan lainnya. Dampaknya adalah kurangnya optimalisasi peran pemerintah daerah dan kurangnya efektivitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi bencana tsunami. Selama ini, persiapan masyarakat terhadap bencana tsunami sering kali kurang memadai karena minimnya pendekatan preventif. Selain itu, pendekatan penanggulangan yang cenderung

			terpusat membuat masyarakat lebih bergantung pada bantuan dari luar daripada mengembangkan kemandiriannya dalam menghadapi bencana tsunami.
1	(Lestari et al., 2023)	Mitigasi Bencana Tsunami Pantai Pangandaran, Jawa Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mitigasi bencana tsunami, telah dilakukan beberapa tindakan struktural seperti penanaman mangrove, pembuatan jalur evakuasi, pembangunan tempat evakuasi sementara dengan jarak sekitar 500 meter dari pantai, konstruksi benteng sebagai pemecah ombak, dan pemasangan sistem peringatan dini tsunami. Selain itu, juga dilakukan upaya mitigasi non-struktural seperti penerapan kebijakan tata guna lahan, pengembangan sistem peringatan dini yang dipublikasikan melalui berbagai media, dan pelaksanaan simulasi mitigasi bencana tsunami. Selain itu, dilakukan juga program inovatif dalam mitigasi bencana tsunami seperti Anak TK Mitigasi, Wisata Edukasi Bencana Goes To School, Silaturahmi Empati Berbagi Edukasi Bencana, Bunda Belajar Mitigasi, Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, dan Hotel dan Restoran Tangguh Bencana.

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah diuraikan, penelitian sebelumnya telah memeriksa pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperdalam analisis terhadap pelaksanaan kebijakan yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya fokus pada kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mendetail terhadap implementasi kebijakan mitigasi bencana tsunami telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan mitigasi bencana tsunami, peneliti dalam hal ini menggunakan teori Geogre C.

Edward III implementasi kebijakan berfokus pada empat variabel kunci kebijakan public yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1.6 Kerangka Teori

1) Manajemen bencana

Bencana adalah sebuah kejadian yang serius yang mengganggu fungsi masyarakat dan menyebabkan kerugian besar terhadap lingkungan, harta benda, dan manusia, melebihi kapasitas masyarakat yang terkena dampak untuk menangani dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Bencana sering dikategorikan berdasarkan kecepatan serangan (apakah tiba-tiba) atau berdasarkan penyebabnya (alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia). Manajemen penanggulangan bencana secara sederhana diartikan sebagai upaya-upaya untuk mengatasi bencana, yang melibatkan ancaman atau bahaya serta kerawanan yang ada di suatu wilayah. Dalam konteks manajemen bencana, bencana dipahami sebagai siklus penanggulangan yang melibatkan berbagai tahapan.

1. Kejadian bencana
2. Penanganan darurat
3. Rehabilitasi
4. Rekontruksi
5. Mitigasi atau pengurangan dampak
6. Kesiapsiangan

2) Mitigasi bencana Tsunami

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi didefinisikan sebagai rangkaian tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Sementara itu, bencana dijelaskan sebagai kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, atau manusia, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam konteks ini, mitigasi bencana dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak yang timbul akibat bencana. Mitigasi bencana merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dikomunikasikan oleh Badan sesuai dengan kondisi dan kewenangan di daerah masing-masing. Pentingnya melakukan mitigasi bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana yang lebih besar serta potensi kerugian dan kerusakan yang lebih parah. Mitigasi bencana mencakup segala langkah yang diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan, termasuk efek yang ditimbulkan dan kondisi yang rentan terhadap bahaya yang dihadapi. Dalam konteks mitigasi bencana alam, ada dua pendekatan yang umum, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural (Godschalk et al., seperti yang disebutkan dalam Kuncoro dan Indrawati, 2019).

a. Mitigasi Struktural Tsunami

Upaya struktural dalam penanggulangan bencana tsunami merupakan tindakan teknis yang bertujuan untuk mengurangi atau meredam energi tsunami yang mencapai wilayah pesisir. Berdasarkan mekanisme terjadinya tsunami, upaya struktural ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Upaya struktural alami, seperti penanaman hutan mangrove atau pembentukan green belt sepanjang kawasan pantai, serta perlindungan terumbu karang.
2. Upaya struktural buatan, termasuk pembangunan konstruksi pemecah gelombang, tanggul, serta instalasi pemecah gelombang di sepanjang pantai untuk menahan serangan tsunami. Selain itu, upaya ini juga mencakup peningkatan desain bangunan dan infrastruktur lainnya dengan prinsip-prinsip rekayasa konstruksi yang tahan terhadap tsunami, serta penerapan peraturan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap bencana.

b. Mitigasi Non Struktural Tsunami

Upaya non struktural merupakan serangkaian tindakan teknis yang melibatkan penyesuaian dan pengaturan aktivitas manusia agar sesuai dengan upaya mitigasi struktural dan upaya lainnya dalam menghadapi ancaman tsunami. Upaya non struktural ini mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan terkait tata ruang dan zonasi kawasan pantai yang aman dari bencana.

2. Standarisasi bangunan dan infrastruktur, termasuk pemukiman dan bangunan lainnya.
3. Mikrozonasi daerah rawan bencana pada tingkat lokal.
4. Pembuatan peta potensi bencana tsunami, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan, untuk merancang pemukiman yang ramah terhadap bencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
5. Kebijakan terkait eksplorasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan pantai.
6. Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami.
7. Penyuluhan dan sosialisasi tentang upaya mitigasi bencana tsunami.
8. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap bahaya tsunami.

3) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahapan setelah suatu produk hukum dikeluarkan, di mana otoritas diberikan pada suatu kebijakan, program, atau output tertentu. Hal ini mencakup serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan arahan tertentu mengenai tujuan dan hasil yang diinginkan. Implementasi ini melibatkan tindakan dan non-tindakan oleh berbagai aktor, terutama di dalam birokrasi, yang bertujuan menghasilkan efek tertentu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan bagian krusial dari proses kebijakan secara keseluruhan, karena tanpa pelaksanaan, kebijakan hanya akan menjadi wacana atau rencana yang tidak pernah diwujudkan. Oleh karena

itu, pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam kebijakan publik..(Akib, 2010)

Pembangunan bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah seperti kemiskinan dan keterbelakangan, dan untuk mencapainya, dibutuhkan program-program pembangunan. Untuk mewujudkan program atau proyek tersebut secara konkret, pelaksanaan atau implementasi menjadi langkah dasar dalam pembangunan. Program-program dipandang sebagai bagian dari proses kebijakan pemerintah yang melibatkan tahapan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, legalisasi, pelaksanaan, dan evaluasi.(Akib, 2010)

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Faktor-faktor tersebut meliputi sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercakup dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, kecocokan lokasi program, kejelasan implementor, dan dukungan sumber daya yang memadai.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno), implementasi merujuk pada apa yang terjadi setelah suatu undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat, atau keluaran nyata. Implementasi melibatkan tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrat, yang bertujuan untuk menjalankan program.

Grindle (dalam Winarno) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk kaitan yang memungkinkan tujuan kebijakan terwujud sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Dunn (2003:132) dalam mendefinisikan konsep implementasi, lebih khusus merujuk pada pelaksanaan tindakan yang terkait dengan kebijakan dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, implementasi dapat dianggap sebagai proses yang memungkinkan pelaksanaan program yang telah diatur dan diorganisir oleh eksekutif (Rokim, 2019). Nugroho (2004:158) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah metode untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua opsi yang tersedia, yaitu dengan menjalankannya dalam bentuk program-program konkrit atau melalui pengembangan kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan publik asal. Proses implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah setelah suatu kebijakan diresmikan atau disahkan. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tertentu, dengan pemahaman tentang hambatan yang mungkin muncul, dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan hukum, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya, semuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Jeklin, 2016).

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam penelitian yang disebutkan oleh Suhari (2017), perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam kerangka teori ini, dijelaskan bahwa terdapat enam variabel bebas yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

ukuran dan tujuan kebijakan dari kebijakan mencerminkan gambaran tentang perubahan yang akan terjadi setelah kebijakan dijalankan. Indikator pencapaian menjadi tahap penting dalam menganalisis implementasi kebijakan. Hal ini mempertimbangkan sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan telah terwujud.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sebuah aspek fundamental yang diperhatikan dalam Implementasi kebijakan adalah mengevaluasi dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang dimaksud mencakup hal seperti alokasi dana yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

3. Interaksi antara organisasi yang berhubungan dan aktivitas pelaksanaan

Kesuksesan pelaksanaan bisa dicapai ketika organisasi mematuhi mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksana untuk konsisten dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuannya.

4. Karakteristik badan pelaksana Ada beberapa unsur yang dapat

Faktor-faktor yang memengaruhi suatu organisasi mencakup:

- a. Tingkat kompetisi dan jumlah staf di dalam lembaga.
- b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan dan proses sub unit dalam organisasi.
- c. Faktor politik yang mempengaruhi dinamika organisasi.
- d. Vitalitas organisasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

- e. Kualitas komunikasi yang terbuka, termasuk jaringan komunikasi horizontal dan vertikal serta kebebasan dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal.
 - f. Keterkaitan formal dan informal antara badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan dalam organisasi.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan, dengan beberapa faktor yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan badan pelaksana.

6. Kecenderungan pelaksana (implementor)

Dalam implementasi kebijakan, penting untuk menyaring para pelaksana sesuai dengan kebijakan yang dihasilkan atau dijalankan. Jika para pelaksana menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan karena menolak tujuannya, hal itu bisa menyebabkan kegagalan dalam implementasi. Sebaliknya, penerimaan terhadap tujuan kebijakan dapat menjadi dorongan untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan difokuskan pada empat variabel kunci dalam kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini harus dipertimbangkan secara bersamaan karena saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk mendalami pemahaman tentang proses implementasi kebijakan dengan memecahnya menjadi komponen prinsip yang lebih sederhana. Implementasi kebijakan merupakan proses yang

dinamis, melibatkan interaksi antara banyak faktor. George C. Edwards III merangkum bahwa implementasi kebijakan adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen yang saling terhubung. Sub-kategori dari faktor-faktor utama ini dijelaskan untuk menyoroti dampaknya dalam proses implementasi.

1. Komunikasi

Komunikasi kunci sukses dalam implementasi kebijakan. Pelaksana harus paham sepenuhnya tentang tujuan dan ukuran kebijakan. Komunikasi yang jelas diperlukan untuk memastikan pemahaman yang benar oleh para pelaksana. Konsistensi dalam pengertian kebijakan perlu ditegaskan agar pelaksana memiliki pemahaman yang benar. Kompleksitas komunikasi dalam organisasi memengaruhi penyebaran informasi. Untuk keberhasilan implementasi, pelaksana harus tahu apakah mereka dapat menjalankan kebijakan dengan benar. Semua personel harus mendukung dan paham tujuan kebijakan. Ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan menghambat hasil optimal. Kurangnya komunikasi serius dapat merugikan implementasi.

2. Sumber Daya

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program, aspek sumber daya, yang mencakup personel, keterampilan, informasi, wewenang, dan fasilitas, memiliki peran yang sangat penting. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan bagi pengawasan yang efektif, dan jika jumlah karyawan terbatas, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui manajemen sumber daya manusia yang efisien. Ketersediaan informasi yang akurat juga menjadi hal yang krusial,

dan kekurangan pengetahuan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap regulasi pemerintah. Selain itu, memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan mengatur keuangan, serta fasilitas yang memadai seperti kantor dan dana, merupakan faktor kunci dalam menjalankan program dengan sukses.

3. Disposisi atau sikap

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Jika mereka sejalan dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan semangat. Namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, implementasi bisa mengalami hambatan. Ada tiga bentuk sikap atau respons pelaksana terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana terhadap kebijakan, arahan yang diberikan kepada pelaksana untuk menerima atau menolak program, dan intensitas respons tersebut. Meskipun pelaksana mungkin memahami tujuan program, mereka kadang-kadang gagal melaksanakannya dengan tepat karena mereka menolak tujuan tersebut dan mencoba menghindarinya secara tidak terbuka.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan, yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Jika dilihat dari perspektif yang luas, implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai elemen seperti aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Di sisi lain, implementasi juga merupakan fenomena yang kompleks yang bisa dipahami sebagai proses, hasil, atau keluaran. Van Meter dan Van Horn, di sisi lain, mempersempit definisi implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. (Sri Komalasari Mustafa, 2016)

4) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

Implementasi kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan antara para aktor yang terlibat, bukanlah sekadar mekanisme di mana sikap aktor secara otomatis mengikuti apa yang telah diformulasikan dalam kebijakan. Munhajir Darwin berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses mekanis di mana setiap aktor akan secara otomatis melaksanakan tugas sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, implementasi kebijakan melibatkan serangkaian kegiatan yang kompleks, sering kali dipengaruhi oleh pertentangan kepentingan di antara para aktor yang terlibat, termasuk administrator, petugas lapangan, atau kelompok sasaran. (doni husen, 2012)

Menurut DR. Pujiono, seorang pakar dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan ini merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam melindungi masyarakat. Karena itu, masyarakat mengharapkan pemerintah dapat menjalankan tugas penanggulangan bencana secara menyeluruh. Pendekatan yang terpadu seperti ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak, termasuk dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat, badan internasional, dan lembaga terkait lainnya.

Menurut Sjarief dan Kodoatie (2006), implementasi kebijakan penanggulangan bencana adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana terhadap komunitas, termasuk dampak terhadap jiwa, harta benda, dan infrastruktur. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dapat dilakukan dalam tiga fase: sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada prinsipnya dapat dilakukan secara fisik dan non fisik dengan regulasi yang baik dan komperhensif dari seluruh rangkaian upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meminimalkan atau mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. disebutkan dalam pasal 20

bahwa badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dengan mengetahui kerentanan bencana yang ada maka dapat dianalisis pola-pola penanggulangan bencana yang digunakan untuk mengurangi dampak bencana dikemudian hari.(doni husen, 2012)

1.7 Definisi Konseptual

1. Menurut University of Wisconsin, Manajemen Bencana adalah serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut.
2. Mitigasi bencana adalah usaha yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana. Tanggung jawab mitigasi bencana umumnya diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Mitigasi bencana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. (Godschalk et al., seperti yang dikutip dalam Triana et al., 2017 dan Kuncoro dan Indrawati, 2019).

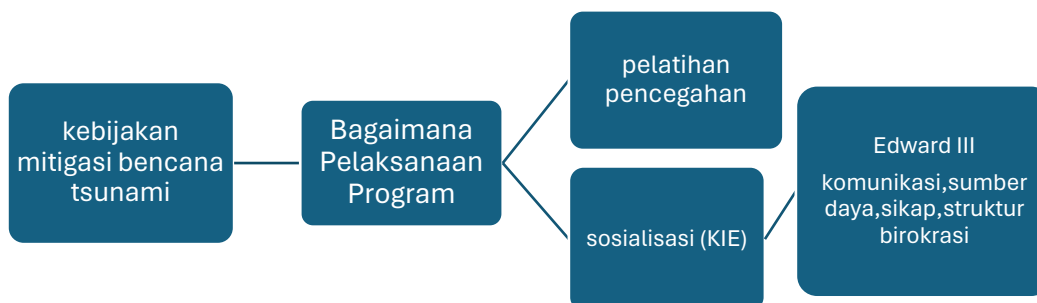
3. Implementasi kebijakan Menurut Wahab (2002: 59), pelaksanaan kebijakan merupakan unsur krusial dalam keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan untuk menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan yang memiliki konsep yang baik dan diformulasikan melalui proses demokratis yang melibatkan semua pemangku kepentingan hanya akan tetap sebagai dokumen tertulis jika tidak diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang tepat. Terdapat fakta bahwa beberapa kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga publik lainnya, seringkali tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Menurut DR. Pujiono, seorang pakar dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan ini merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam melindungi masyarakat. Karena itu, masyarakat mengharapkan pemerintah dapat menjalankan tugas penanggulangan bencana secara menyeluruh. Pendekatan yang terpadu seperti ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak, termasuk dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat, badan internasional, dan lembaga terkait lainnya.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Komunikasi	Kejelasan penyampaian informasi	Informasi Pembangunan anti tsunami
Sumber daya	Staf	Jumlah staf OPD yang terlibat
	Anggaran	Dana yang dialokasikan OPD
Disposisi	Komitmen	Tingkat keterlibatan dan keaktifan OPD
Struktur birokrasi	Tata kerja	SOP dan mekanisme kerja

1.9 Kerangka Berpikir



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau

mencapai tujuan penelitian tertentu. Penggunaan metode penelitian membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Variasi dalam metode penelitian dapat terjadi bergantung pada jenis penelitian, pertanyaan penelitian yang diajukan, dan sumber data yang digunakan. (Anggito, 2018).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati. Penggunaan data deskriptif dalam penelitian kualitatif memberikan keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Dengan peneliti menjelaskan situasi atau konteks dengan detail yang lebih besar, menggali makna di balik fenomena, dan kompleksitas dunia nyata, data deskriptif mendukung Pembangunan teori, meningkatkan validitas hasil penelitian, data deskriptif juga memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, menjadi kunci dalam memberikan wawasan mendalam dalam penelitian kualitatif. Metode ini berpusat pada penyelidikan fenomena yang sedang diteliti, mengejar solusi terhadap masalah yang didasarkan pada situasi saat ini, dan menyediakan informasi yang relevan untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam berbagai konteks. Pendekatan kualitatif secara garis besar bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual tentang suatu peristiwa atau gejala dengan akurasi yang tinggi. Alasan pemilihan metode kualitatif adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan beragam situasi, membangun

hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan, serta sensitivitasnya terhadap perubahan pola nilai yang dihadapi peneliti (Hasan et al., 2022).

Penelitian ini difokuskan pengumpulan fakta-fakta terkait dengan kebijakan mitigasi bencana tsunami di kabupaten Kulon Progo provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa data yang terkumpul di lapangan mungkin terdiri dari fakta-fakta yang memerlukan analisis yang mendalam. Karena itu, pendekatan kualitatif dianggap lebih mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, terutama dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berinteraksi langsung dengan objek penelitian atau instrumen yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan mitigasi bencana.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini terletak kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Kawasan Pemukiman Kulon Progo dan Bappeda Kulon Progo dan Desa Glagah Kecamatan Temon

Dalam setiap daerah permasalahan pasti akan muncul dan selalu ada, namun tidak semua daerah mempunyai permasalahan yang sama. Dengan pertimbangan waktu yang tersedia, jarak yang ditempuh tenaga dan biaya yang

harus dikeluarkan oleh penulis, maka penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kulon Progo.

3. Jenis data

penelitian ini, peneliti menggabungkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan data yang baru, diambil dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer dapat mencakup hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu:

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo
2. Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Bappeda Kulon Progo
5. Kepala lurah Desa Glahgah kecamatan Temon

Data Primer digunakan untuk mendapatkan pemahaman, sudut pandang, pengalaman, dan informasi yang kontekstual terkait dengan kebijakan mitigasi bencana tsunami di Kulon Progo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat suatu keadaan konsep penelitian didalam objek yang akan di jadikan penelitian. Data sekunder menggunakan Teknik pengumpulan data meliputi Rencana kerja (RENJA), LAKIP, Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD), Surat Perintah Kerja (SKP), Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana kerja Pemerintah (RKP).

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara secara mendalam (in-depth interview): Metode ini menjadi pendekatan utama dalam mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan responden yang terlibat dalam kebijakan mitigasi bencana tsunami. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman, pandangan, dan pemahaman responden terkait kebijakan mitigasi bencana tsunami tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian yaitu: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kulon Progo, Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, staf-staf kantor BPBD Kulon Progo dan Masyarakat Kulon Progo yang merupakan obyek langsung dari kebijakan pemerintah.

Table 1.3 Daftar Informan Dan Pertanyaan

No	Informan	Nama	Jumlah	Pertanyaan
2.	Staf pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD	Herlambang Sapto Aji	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apa bentuk mitigasi struktural yang dilakukan BPBD? - Apakah ada sosialisasi mitigasi tsunami? - Berapa jumlah staf yang terlibat dalam program mitigasi tsunami? - Berapa jumlah dana yang dialokasikan BPBD untuk mitigasi tsunami? - Bagaimana mekanisme kerja BPBD dalam pelaksanaan mitigasi tsunami? - Apakah BPBD memiliki SOP dalam pelaksanaan mitigasi tsunami? - Apakah BPBD berkerja sama dengan instansi lain?
3.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	Wuriandreza Gigih Muktitama, S.T., M.Sc	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja Upaya mitigasi dari Dinas PUPR khususnya berkaitan dengan infrakstruktur? - Berapa dana yang dialokasikan untuk membangun infrakstruktur tersebut? - Dana yang digunakan apakah dari APBD saja atau dari lainnya/ berdasarkan Kerjasama? -

4.	Bidang infrastruktur dan Pembangunan wilayah Bappeda Kulon Progo	Ika Yonita G, S.Si.,M.P.P.,URP	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja kebijakan yang dibuat Bappeda untuk mitigasi bencana tsunami diKulon Progo? - Apakah ada staf yang terlibat dalam mitigasi tersebut? - Bagaimana koordinasi Bappeda dengan BPBD atau OPD lainnya dalam Upaya mitigasi tsunami? - Apakah dalam RPJMD ada membahas tentang mitigasi bencana khususnya bencana tsunami?
5.	Kepala Lurah Desa glagah kecamatan Temon	Sigit Pramono	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apa bentuk mitigasi tsunami yang disampaikan BPBD atau OPD lainnya? - Apakah ada OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program mitigasi tsunami

2. Analisis dokumen: Teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan data.

Peneliti menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan mitigasi bencana tsunami, pelaksanaan kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu kebijakan tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan secara hati-hati dan terstruktur. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen disusun secara sistematis untuk membentuk dasar data. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul. Selama proses analisis, peneliti akan mengacu pada teori-teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. Pendekatan ini bertujuan

untuk menyelidiki dan mengurai data dengan lebih mendalam, sehingga dapat merumuskan temuan yang substansial bagi peneliti.

5. Teknik analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan menyajikannya secara efektif. Menurut Moleong (2011:248), analisis data merupakan proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengorganisasi, memilih, dan menyintesis data menjadi unit yang dapat dikelola, serta mengidentifikasi pola, informasi penting, dan temuan yang dapat dipelajari.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data untuk memproses data yang telah dikumpulkan. Salah satu teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yang mengacu pada pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017) dan disebutkan dalam penelitian oleh Lauwis, Edwin, dan Setyawati (2018).

a. Reduksi data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, yang diperoleh mencapai jumlah yang cukup banyak, oleh karena itu perlu adanya pencatatan secara teliti dan juga rinci. Mereduksi data merupakan merangkum data yang sudah di peroleh selama penelitian di lapangan, serta memfokuskan pada hal yang pokok dan juga penting. Dengan demikian ini dari data yang diperoleh tersebut akan memberikan pada hasil gambaran yang lebih jelas dan juga akan

lebih memudahkan peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu tahapan penting dalam menyusun laporan hasil penelitian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabel data, deskripsi naratif, atau grafik. Dalam penelitian ini, akan disajikan data deskriptif secara rinci mengenai implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Kulon Progo.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diperoleh pada awalnya bersifat sementara, dan dapat dipengaruhi oleh kekuatan bukti yang ditemukan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan pada tahap pengumpulan data hingga ditemukannya bukti yang kuat. Jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut akan menjadi lebih kredibel.